

# TILIK DATA

## “Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Singapura”

Reine Prihandoko  
Dizar Sabana  
Patricia

14 Maret 2022

# Ringkasan Eksekutif

Di bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia telah menyepakati perjanjian kerja sama bilateral maupun multilateral dengan 73 negara mitra, termasuk Singapura. Mayoritas perjanjian tersebut disepakati di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rerata waktu antara penandatanganan kesepakatan dengan ratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan adalah lebih dari 5 tahun, sedangkan bidang keamanan memerlukan waktu hampir 3 tahun. Adapun ratifikasi kesepakatan antara Indonesia dan Singapura rata-rata membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun.

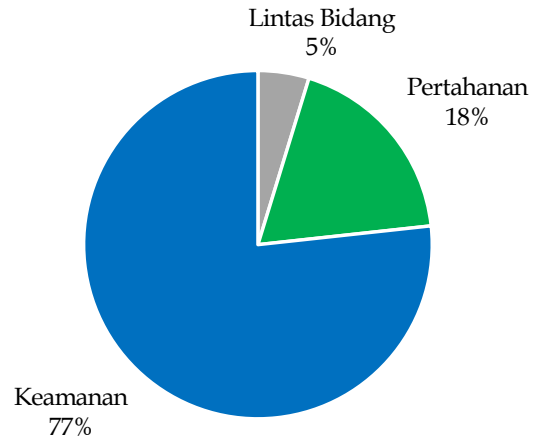
Secara substansi, Indonesia paling banyak menjalin kerja sama pertahanan dan keamanan untuk mengatasi isu-isu kejahatan transnasional. Dilihat dari bentuk kegiatannya, pertukaran informasi merupakan jenis kerja sama yang paling dasar dan melibatkan hampir seluruh negara mitra Indonesia.

Dalam waktu hampir dua puluh tahun terakhir, diplomasi pertahanan bilateral Indonesia cenderung mengalami pergeseran agenda dari semula hanya membangun kepercayaan menjadi pengembangan kemampuan nasional.

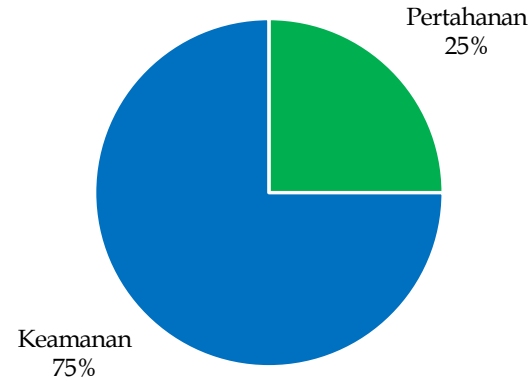
Secara kumulatif, Singapura menempati posisi ketiga sebagai mitra utama diplomasi pertahanan Indonesia. *Defence Cooperation Agreement* (DCA) antara kedua negara mengadopsi cakupan isu dan jenis kegiatan yang umumnya dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara mitra lain.

# Kesepakatan Pertahanan dan Keamanan Indonesia

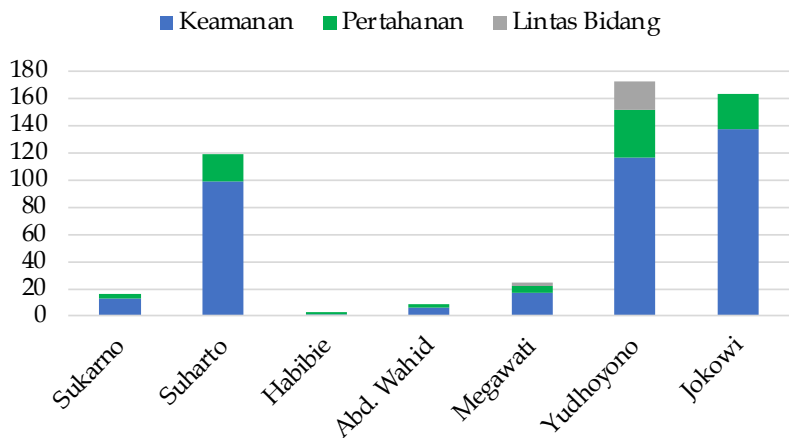
Persentase Perjanjian



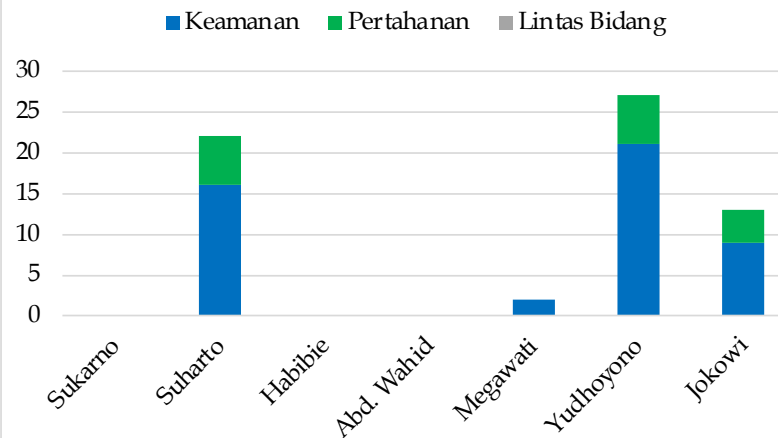
Persentase Perjanjian yang Melibatkan Singapura



Jumlah Perjanjian



Jumlah Perjanjian yang Melibatkan Singapura



Pada periode 1960-2021, terdapat **507 kesepakatan** antara Indonesia dan negara-negara mitra mengenai kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan. Dari angka itu, hanya **18%** yang membidangi soal-soal **pertahanan**. Mayoritas kesepakatan berbentuk **kerja sama bilateral**.

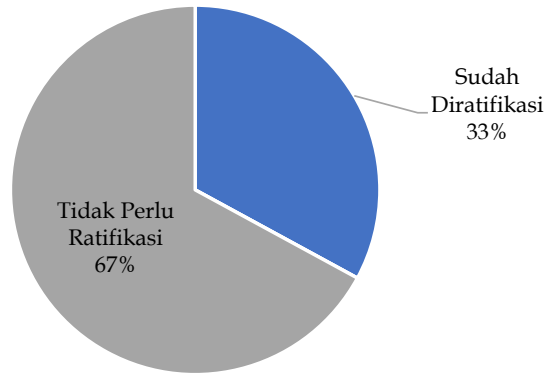
Kesepakatan yang melibatkan **Singapura**, baik bilateral maupun multilateral mengambil porsi **12%** dari keseluruhan data. Kesepakatan Indonesia dengan Singapura tersebut lebih banyak di bidang **Keamanan (75%)** dibanding **Pertahanan (25%)**.

Kesepakatan di bidang pertahanan maupun keamanan paling banyak disepakati pada masa pemerintahan **Yudhoyono** dan **Jokowi**. Sementara, kesepakatan yang sifatnya lintas bidang dicapai pada masa pemerintahan Megawati dan Yudhoyono. Pada kedua periode itu, Indonesia memang banyak membuka hubungan kerja sama dengan negara-negara baru.

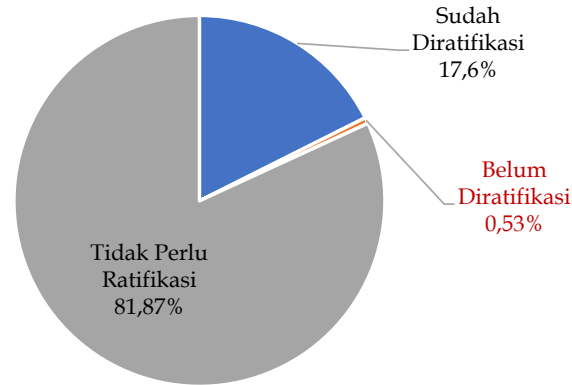
Kesepakatan yang melibatkan **Singapura** paling banyak terjadi pada masa pemerintahan **Yudhoyono**. Mayoritas di antaranya kerja sama antarnegara ASEAN, termasuk Singapura sebagai negara anggotanya.

# Ratifikasi Kesepakatan Pertahanan dan Keamanan Indonesia

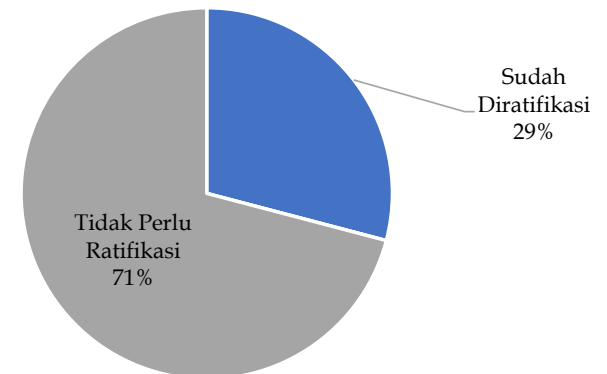
Status Perjanjian di Bidang Pertahanan



Status Perjanjian di Bidang Keamanan

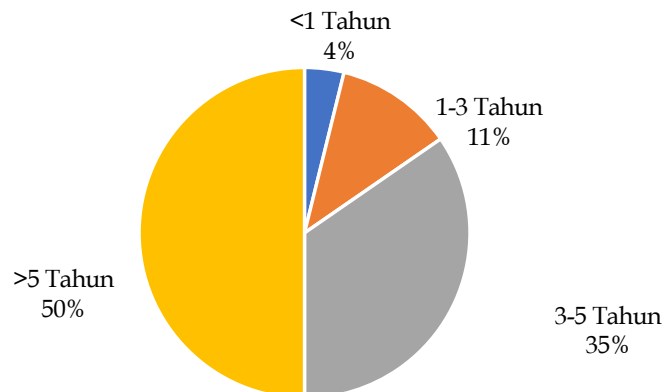


Status Perjanjian di Bidang Pertahanan dan Keamanan yang Melibatkan Singapura

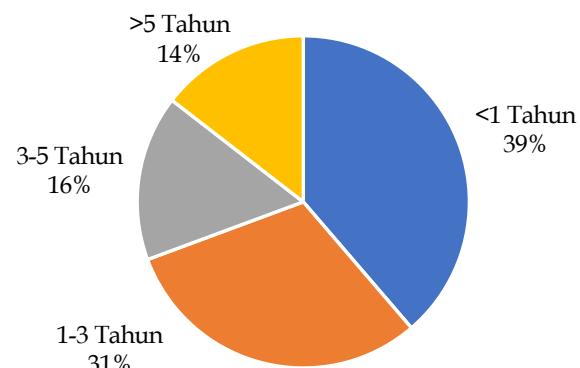


Hanya terdapat **dua** kesepakatan di bidang **keamanan** yang belum diratifikasi. Rerata durasi antara kesepakatan dengan ratifikasi perjanjian **Pertahanan** membutuhkan waktu **5,77 tahun**, sedangkan perjanjian **Keamanan** membutuhkan waktu yang lebih singkat, yakni **2,91 tahun**. Perjanjian yang melibatkan **Singapura** secara bilateral dan multilateral cenderung hanya membutuhkan rerata waktu **1,42 tahun** untuk diratifikasi. Meskipun demikian, kesepakatan **bilateral** dengan **Singapura** membutuhkan rerata waktu ratifikasi yang lebih lama, yaitu **3,25 tahun**.

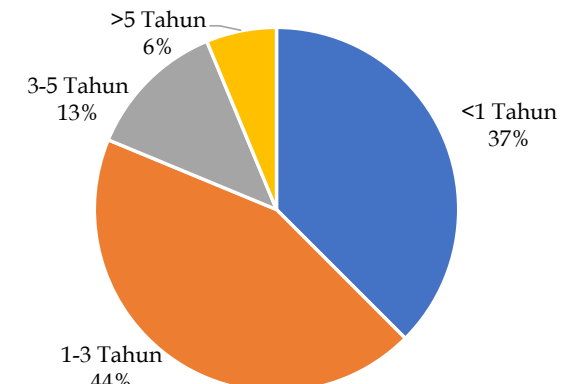
Durasi Ratifikasi Perjanjian di Bidang Pertahanan



Durasi Ratifikasi Perjanjian di Bidang Keamanan



Durasi Ratifikasi Perjanjian di Bidang Pertahanan dan Keamanan yang Melibatkan Singapura



# Isu Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan Indonesia

## Pengendalian Perbatasan



## Kontra-Terror



## Bantuan Kemanusiaan & Penanggulangan Bencana



## Industri & Teknologi



## Keamanan Maritim



## Non-Proliferasi



## Kejahatan Transnasional



## Umum

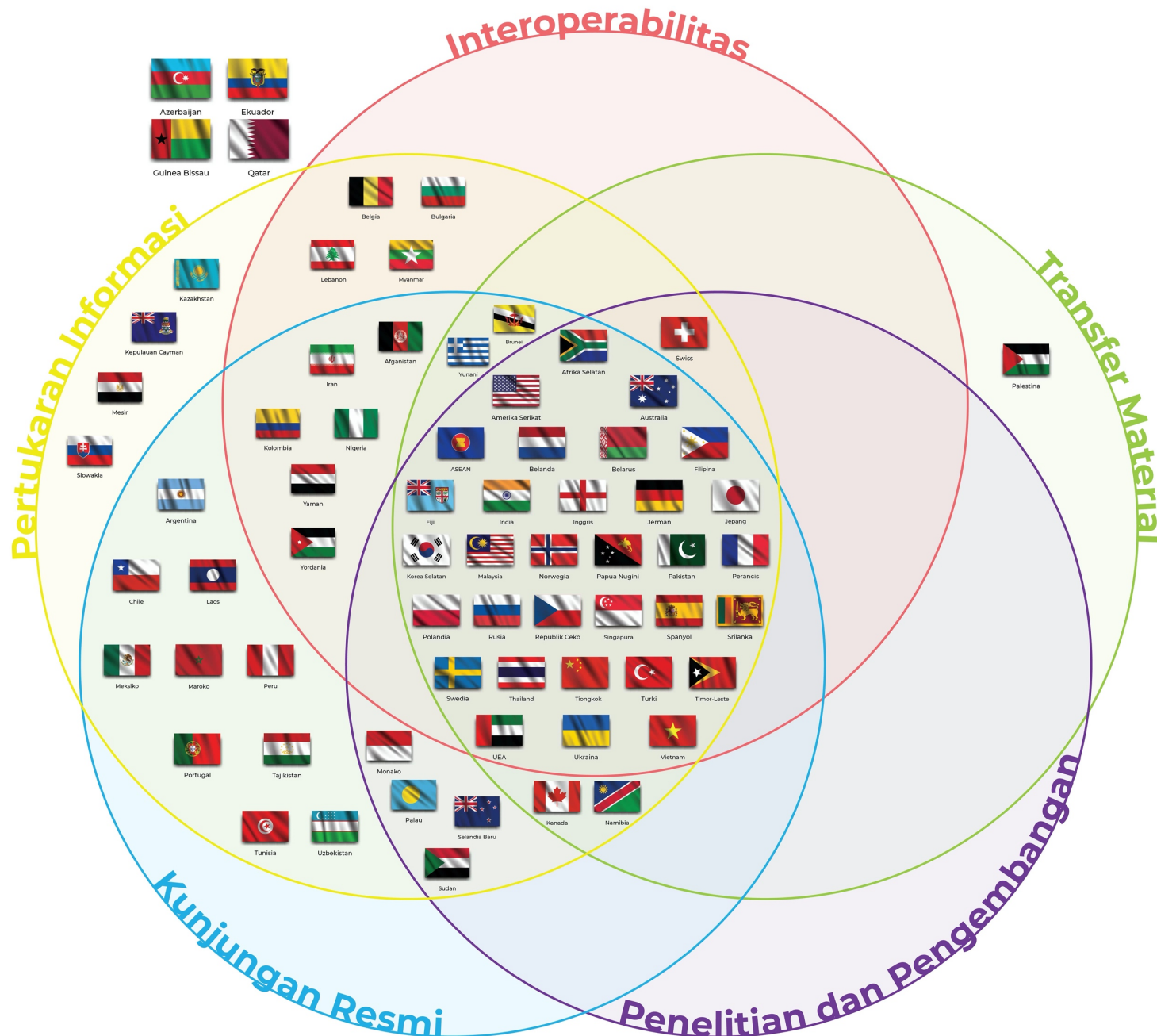


Secara umum, kerja sama pertahanan dan keamanan Indonesia dengan negara mitranya dapat dikategorikan ke dalam tujuh substansi, yaitu pengendalian perbatasan, kontrateror, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, industri dan teknologi, keamanan maritim, non-proliferasi, dan kejahatan transnasional, serta kategori umum yang menyangkut isu-isu lainnya.

Secara khusus, Indonesia paling banyak menjalin kerja sama pada isu kejahatan transnasional. **Australia, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang** menjadi mitra Indonesia yang memiliki kesepakatan kerja sama di seluruh kategori isu tersebut.

Indonesia dan **Singapura** secara bilateral menyepakati kerja sama di seluruh isu, kecuali isu non-proliferasi. Peralnya, Indonesia dan Singapura sudah memiliki kerja sama secara multilateral dalam *Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty* yang dipayungi oleh ASEAN.

# Kegiatan Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan Indonesia

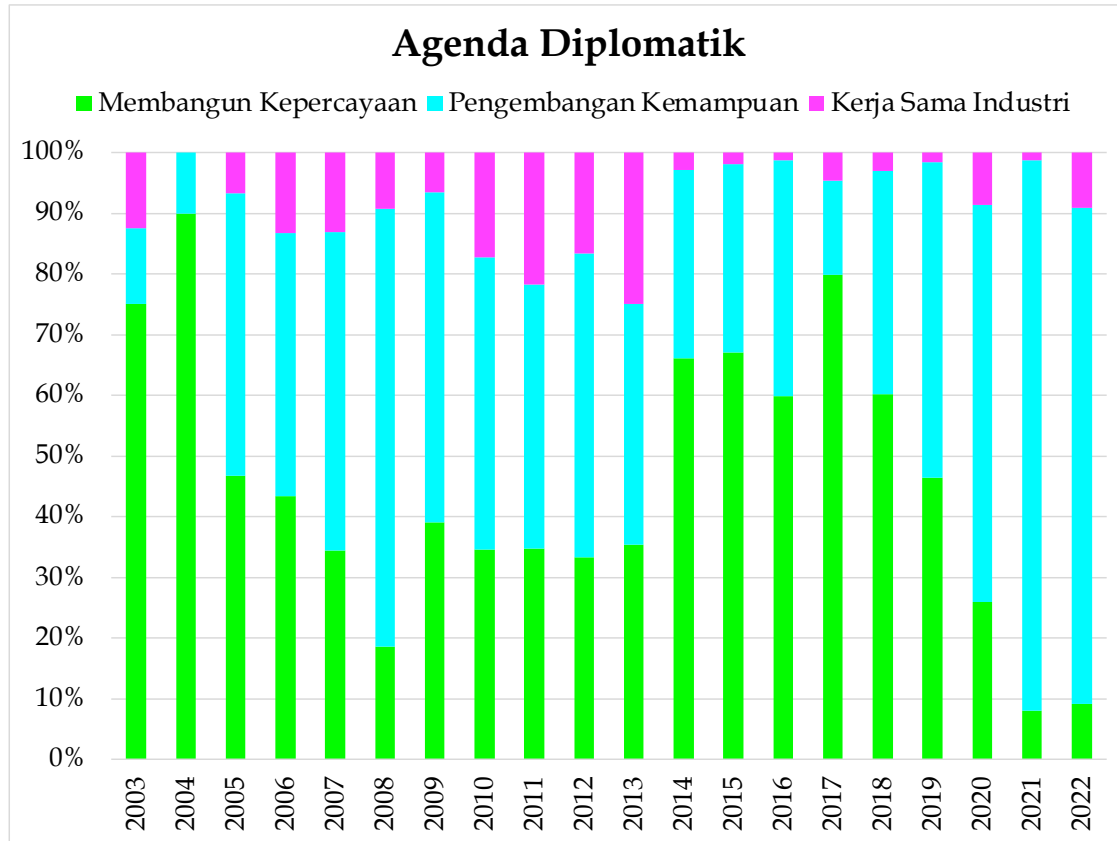


Secara umum, kegiatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan antara Indonesia dengan negara-negara mitra dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yakni pertukaran informasi, interoperabilitas, transfer material, penelitian dan pengembangan, serta kunjungan resmi. Indonesia dan **Singapura** secara bilateral telah menyepakati kerja sama di kelima bentuk kegiatan itu.

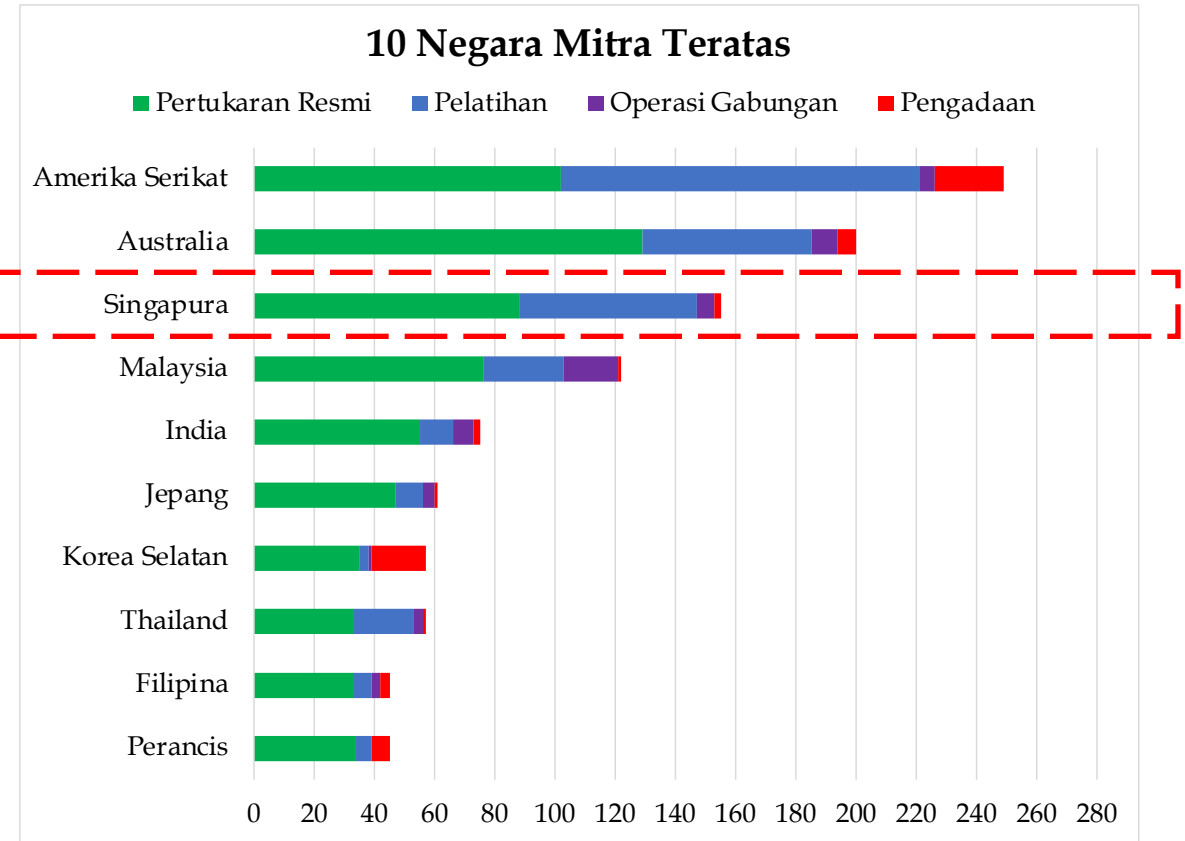
Seluruh negara mitra Indonesia sepakat untuk **bertukar informasi sebagai kegiatan dasar kerja sama** di bidang pertahanan dan keamanan. Sementara itu, Indonesia dengan Palestina secara spesifik menjalin kerja sama keamanan dalam hal pengiriman bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana.

Sementara itu, Indonesia baru menjajaki kerja sama dengan Azerbaijan, Ekuador, Guinea Bissau, dan Qatar di bidang pertahanan-keamanan, sehingga belum memiliki perjanjian yang menyatakan jenis kegiatan kerja sama yang secara lebih spesifik dari kelima kategori.

# Diplomasi Pertahanan Bilateral Indonesia

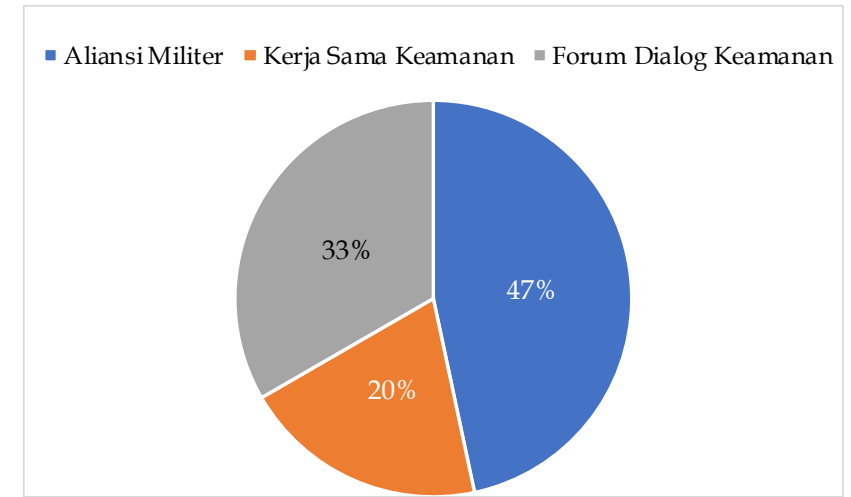
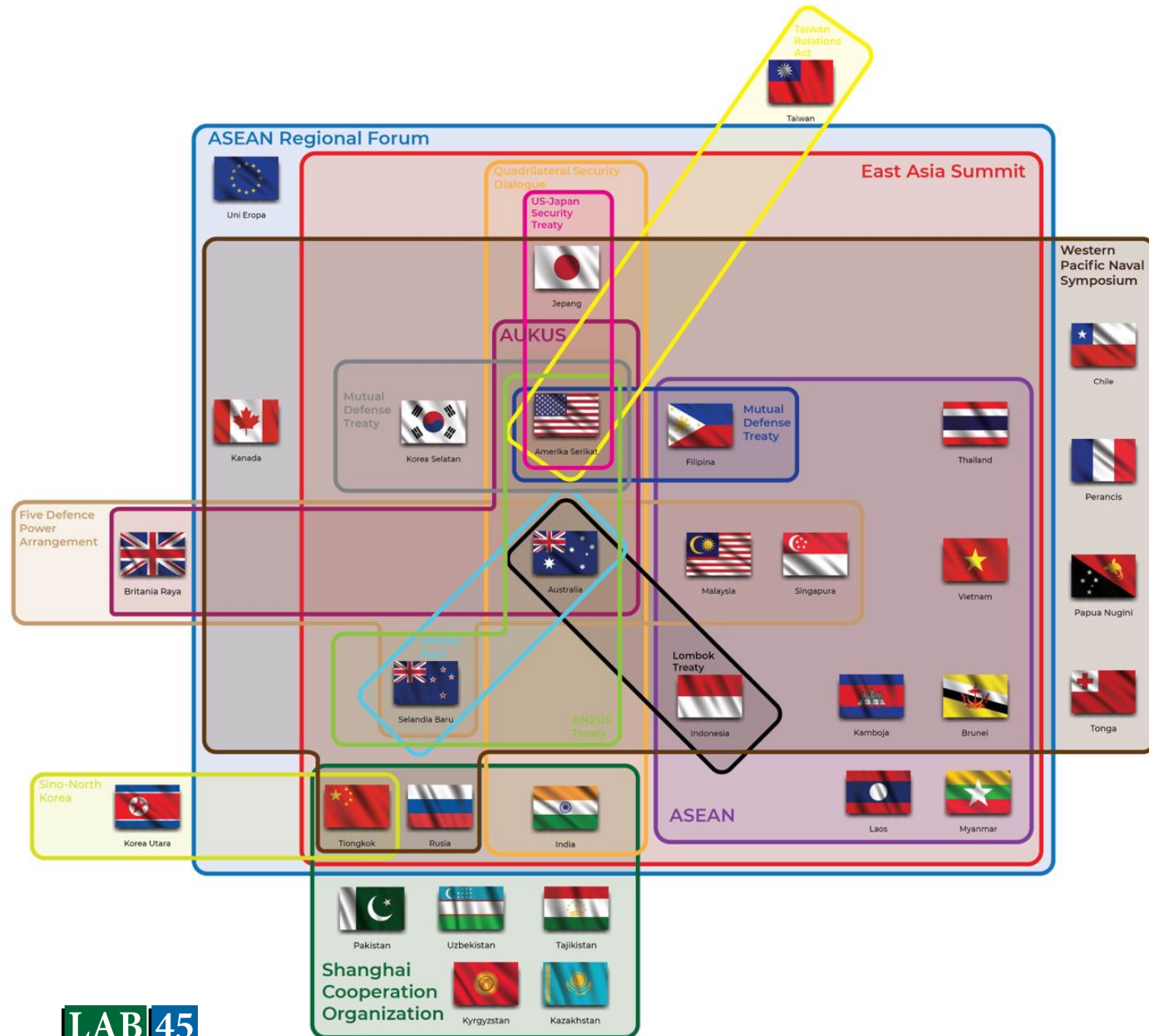


Dari segi proporsional, terjadi pergeseran agenda dalam diplomasi pertahanan bilateral Indonesia dari semula padat dengan langkah **membangun kepercayaan** menjadi lebih banyak aspek **pengembangan kemampuan**, terutama di tiga tahun terakhir. Tren ini menunjukkan bahwa Indonesia dan negara-negara mitra memiliki tujuan bersama untuk memperkaya kecakapan personel dalam bentuk latihan bersama, operasi gabungan, maupun sebatas pertukaran resmi antarpejabat. Temuan serupa juga berlaku dengan **Singapura**.



Sejak tahun 2003, Indonesia telah melakukan diplomasi pertahanan bilateral dengan **73 negara**. Mayoritas mitra utama Indonesia merupakan negara-negara yang memiliki **kedekatan geografis** (anggota ASEAN) atau yang merupakan mitra strategis di **kawasan Asia-Pasifik** (Australia, India, Jepang, dan Korea Selatan) maupun negara besar di **luar kawasan** (Amerika Serikat dan Perancis). Aktivitas yang paling sering Indonesia lakukan dengan negara mitra adalah mengadakan **pertukaran resmi** antarpejabat dan **pelatihan** bagi para personel. **Singapura** sendiri menempati posisi **ketiga** sebagai mitra diplomasi pertahanan utama Indonesia.

# Kerangka Kerja Sama Keamanan Regional



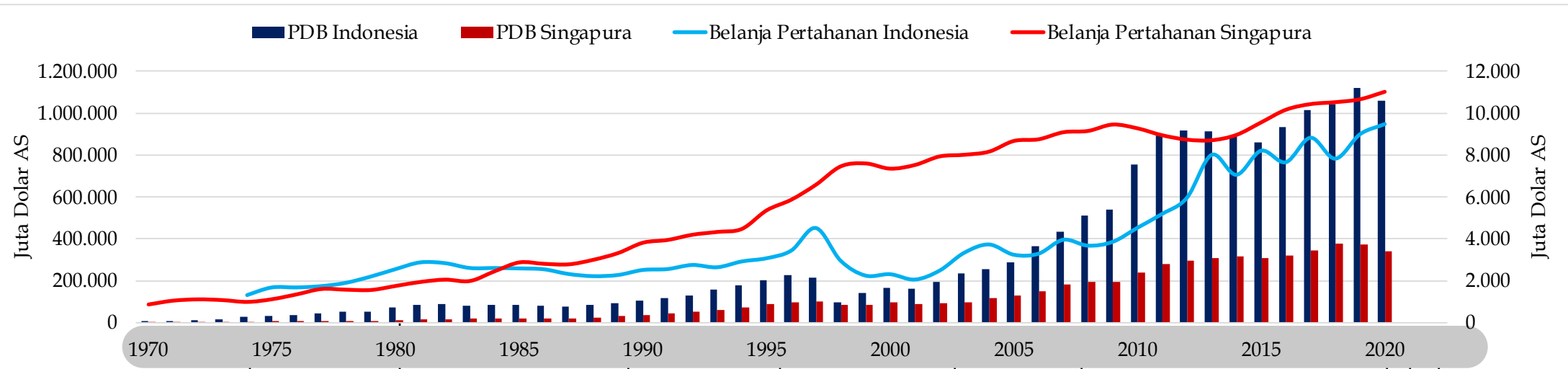
Arsitektur politik-keamanan negara Asia-Pasifik termanifestasi dalam berbagai bentuk, baik regional maupun subregional. Kerangka kerja sama tersebut paling banyak berupa forum dialog keamanan.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau lebih populer dengan sebutan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* merupakan organisasi regional utama. ASEAN membentuk sebuah forum bernama *ASEAN Regional Forum (ARF)* yang menjadi kerangka kerja sama keamanan terbesar dengan anggota 27 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, serta negara-negara besar di luar kawasan Asia seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, dan bahkan Uni Eropa.

Selain itu, terdapat tujuh yang berbentuk aliansi, yakni *Five Defence Power Arrangement (FPDA)*, *ANZUS Treaty*, *US-Japan Security Treaty*, *Mutual Defense Treaty (AS-Korea Selatan dan AS-Filipina)*, *Taiwan Relations Act*, dan *Sino-North Korea*. Mayoritas pakta pertahanan tersebut hanya melibatkan dua negara.



# Diplomasi Pertahanan Indonesia-Singapura



Bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dengan Singapura dimulai sebagai kegiatan latihan bersama dan pemberian akses ke sarana militer Indonesia. Tren belanja pertahanan maupun Produk Domestik Bruto (PDB) kedua negara hingga akhir tahun 1990an cukup bersaing. Meskipun PDB Indonesia kian meningkat sejak tahun 2000an, tren ini tidak diikuti dengan kenaikan belanja pertahanan. Akibatnya, perbedaan proporsi belanja pertahanan terhadap PDB antara kedua negara semakin melebar. Polemik DCA di tahun 2007 terjadi saat *gap* belanja pertahanan kedua negara paling besar selama lima dekade terakhir.

- ▶ 1974 Latihan Militer Indopura
- ▶ 1980 Elang Indopura
- ▶ Mar 1989 Peresmian *Air Weapons Range* (AWR) Siabu
- ▶ Jul 1989 Singapura diberikan akses ke pusat pelatihan militer di Baturaja, Sumatera
- ▶ Des 1989 Safkar Indopura
- ▶ 1995 Perjanjian *Indonesia-Singapore Military Training Area* (MTA)
- ▶ 2003 Perjanjian MTA Berakhir
- ▶ Apr 2007 Penandatanganan *Defence Cooperation Agreement* (DCA) INA-SIN
- ▶ Mei 2007 DPR tolak DCA dan aturan pelaksanaannya
- ▶ 8 Okt 2007 Penundaan DCA
- ▶ Okt 2019 Jokowi - Lee Menyepakati Kelanjutan Pembahasan DCA
- ▶ Mar 2020 Pandemi COVID-19
- ▶ Jan 2021 Bantuan tim pencarian Pesawat Sriwijaya Air SJ182
- ▶ Apr 2021 Bantuan *MV Swift Rescue* untuk pencarian KRI Nanggala
- ▶ Jan 2022 Pertemuan Jokowi - Lee (Komitmen Penyelesaian DCA)

**Keterangan:** ▶ Latihan Militer    ▶ DCA    ▶ HADR

# DCA Indonesia dan Singapura

## CAKUPAN

▪ **Kunjungan resmi** dalam rangka konsultasi dan dialog reguler

**Latihan militer bersama** atau terpisah

**Penyediaan logistik, serta akses bersama** ke sarana prasarana, dan area militer dalam rangka pelatihan

**Pertukaran personel militer** secara reguler untuk saling mengikuti berbagai kursus dan program militer

**Pengembangan industri dan teknologi** melalui pelatihan SDM, penelitian ilmiah, dan pengembangan proyek bersama

**Pertukaran informasi dan intelijen kontraterorisme**

**Upaya penanggulangan bencana dan pengiriman bantuan kemanusiaan**

## DURASI

▪ **25 tahun**

Peninjauan kembali DCA dan IA setiap **6 tahun** sekali setelah 13 tahun

DCA dan IA diperbarui untuk periode **6 tahun** setelah setiap peninjauan kecuali saling menyepakati

# DCA Indonesia dan Singapura

## PELAKSANAAN

### Indonesia

### Singapura

▪ Pengembangan area dan fasilitas pelatihan di Indonesia untuk latihan gabungan TNI dan SAF

Pemulihan dan pemeliharaan *Air Combat Manoeuvring Range*

Pengoperasian dan pemeliharaan *Siabu Air Weapons Range*

Bantuan teknis dan akses pada fasilitas latihan AL

Pembangunan *Overland Flying Training Area Range*

Pulau Kayu Ara untuk pelatihan Bantuan Tembakan Laut

Pengembangan dan penggunaan Daerah Latihan di Baturaja

Bantuan pelatihan oleh SAF kepada TNI di bidang simulator (kursus-kursus tehnik dan akademik)

▪ Mengawasi latihan dengan mengirimkan pengamat dan berhak mengikuti latihan tersebut setelah adanya konsultasi teknis dengan peserta

▪ Akses ke wilayah udara dan laut Indonesia untuk latihan dan pengecekan teknis SAF

Tes kelaikan terbang, pengecekan teknis dan latihan terbang di Daerah Alpha Satu

Latihan dan pelatihan militer di Daerah Alpha Dua

Kapal AL Singapura dapat lakukan manuver laut dan latihan bersama dengan pesawat AU Singapura, di udara dan perairan Area Bravo

AL Singapura dengan dukungan AU Singapura dapat lakukan latihan menembak peluru kendali (s.d 4x/tahun) di Area Bravo

▪ Mengadakan latihan bersama dengan pihak ketiga di area Alpha Dua dan Bravo dengan izin Indonesia

Personil dan peralatan pihak ketiga akan diperlakukan sama dengan personel SAF

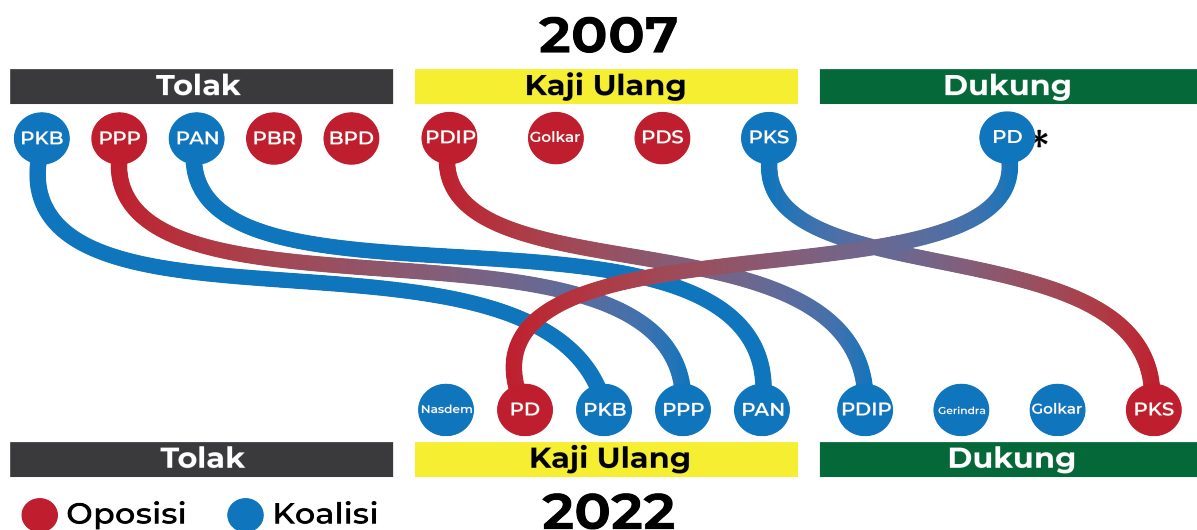
Secara umum, *Defence Cooperation Agreement* dengan Singapura mengadopsi bentuk-bentuk kegiatan yang normal dilakukan antara Indonesia dan negara-negara mitra lain. Aspek unik dari kerja sama bilateral ini terletak pada pemberian akses bagi *Singapore Armed Force* (SAF) untuk melakukan latihan di wilayah Indonesia.

Perkembangan terbaru tersebut membuka alternatif bagi Singapura untuk mengatur ulang gelar satuan-satuan pendidikan dan pelatihan militernya di luar Asia Tenggara. Dalam dua dekade terakhir, latihan bersama antara SAF dan militer Taiwan kerap mengakibatkan kompleksitas dalam hubungan Singapura dan Tiongkok. Beijing bahkan berulang kali menawarkan daerah latihan baru di Hainan, namun sulit diterima pemerintah negara kota itu tanpa mengorbankan relasinya dengan Amerika Serikat.

Dalam jangka panjang, DCA relatif akan memperkuat posisi dan kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara. Reposisi pelatihan SAF dari wilayah dengan risiko geopolitik tinggi menghindarkan ASEAN dari konflik regional. Pengembangan infrastruktur olah yudha bersama Singapura membuka peluang bagi TNI untuk menguji coba doktrin operasi militer gabungan. Dependensi SAF terhadap wilayah Indonesia juga mendorong investasi dan kerja sama baru, termasuk di bidang teknologi pertahanan.

# Dinamika Proses Ratifikasi DCA di DPR

## Perubahan Posisi Partai



Terdapat pergeseran posisi politik partai-partai terhadap DCA dari tahun 2007 dengan posisi mereka sekarang. Mayoritas partai di parlemen pada tahun **2007 menolak** dan bahkan meminta untuk membatalkan DCA dengan Singapura. Penolakan ini datang, baik dari partai pendukung pemerintah maupun partai oposisi.

Terekam hanya Partai Demokrat (PD) yang mendukung kelanjutan DCA. Dukungan sepenuhnya hanya datang dari Presiden Yudhoyono yang juga merupakan Ketua Partai Demokrat kala itu. Namun, beberapa legislator PD masih berpendapat bahwa DCA perlu didalami terlebih dahulu sebelum dilanjutkan.

Secara umum, nuansa penolakan mendominasi DPR pada tahun 2007. Sebaliknya, mayoritas anggota parlemen sekarang cenderung **setuju untuk dilanjutkan** dengan beberapa catatan. Temuan ini cenderung anomali karena terdapat pergeseran sikap partai terjadi tanpa adanya perubahan substansi DCA. Yang berbeda adalah posisi politik partai dalam peta koalisi pendukung atau oposisi terhadap pemerintah pada tahun 2007 dan 2022.

## Pernyataan Elite Partai

2007

Tolak	Kaji Ulang	Dukung*
<p><b>Joko Susilo (PAN)</b></p> <p>Fraksi PAN juga menolak untuk meratifikasi perjanjian pertahanan itu karena banyak bolongnya dan amat merugikan kepentingan Republik Indonesia</p>	<p><b>Andreas Pareira (PDIP)</b></p> <p>Indonesia harus berani meminta penjelasan ulang ke Singapura tentang rencana ratifikasi terhadap DCA karena ada beberapa poin yang belum disepakati Indonesia-Singapura seperti area latihan.</p>	<p><b>Boy W. Saul (PD)</b></p> <p>Meminta Dephan, Mabes TNI, DPR, dan pakar untuk membahas lebih dalam rumusan penerapan DCA Indonesia-Singapura dengan mempertimbangkan banyak aspek karena tidak bisa serta merta dibatalkan.</p>

2022

Tolak	Kaji Ulang	Dukung
-	<p><b>Anton Sukartono Suratto (PD)</b></p> <p>Yang menjadi <i>bargaining</i> (tawaran), oke kami (Singapura) kasih ekstradisi, maka kami (Singapura) minta FIR, minta DCA, itu yang kami rasa keberatan di situ berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia.</p>	<p><b>Sukamta (PKS)</b></p> <p>(Terkait DCA) Tentu ini perlu dicermati terkait potensi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, perlu dikaji dari sisi geostrategis dan geopolitik.</p>

